

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akses untuk mendapatkan makanan merupakan hak asasi manusia (HAM) dasar pada setiap manusia di dunia. Setelah bertahun-tahun dilakukan Deklarasi HAM, perjuangan untuk mencapai hak dasar manusia, salah satunya hak untuk mendapatkan makanan masih terus dilakukan. Kelaparan merupakan sebuah pelanggaran terhadap martabat manusia yang bisa menghambat progres ekonomi, politik dan sosial. Hal ini dapat mencegah manusia untuk mengembangkan skillnya, menggunakan manfaat teknologi terbaru dan kehilangan kesempatan pembangunan lainnya. Jumlah kelaparan kronis yang melanda negara-negara berkembang dan miskin di dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan sementara tidak ada penurunan yang signifikan terhadap angka penderita kelaparan dan malnutrisi.<sup>1</sup>

Korea Utara merupakan salah satu negara yang masih mengalami kelaparan sampai saat ini. Permasalahan kelaparan di Korea Utara pada awalnya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan yang sudah dirasakan pada tahun 1950. Ditambah lagi dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai negara pemberi bantuan utama ke Korea Utara pasca perang dunia ke dua, dan terus menurun turun semenjak tahun 1970.<sup>2</sup> Penurunan ketersediaan pangan ini merupakan kegagalan pemerintah dalam program distribusi kembali lahan pertanian yang

---

<sup>1</sup> World Food Programme: *Annual Report 1998*, <http://www.wfp.org>, hal. 3

<sup>2</sup> Rhoda E. Howard-Hassmann, *State-Induced Famine and Penal Starvation in North Korea* (Canada Research Chair in International Human Rights, Department of Global Studies and Balsillie School of International Affairs, Wilfrid Laurier University, 2011), hal. 6

dianggap tidak berhasil karena tidak efektif sehingga hasil produksi pertanian semakin menurun.<sup>3</sup>

Isu kelaparan di Korea Utara dimulai pada tahun 1990 yang dikatakan sebagai kelaparan terparah yang pernah terjadi. Bencana kelaparan pada pertengahan tahun 1990 ini menyebabkan sekitar 600 ribu sampai 3 juta rakyatnya mati kelaparan atau kira-kira 5% sampai 10% karena tidak cukupnya persediaan pangan yang tersedia dan bisa mereka dapatkan.<sup>4</sup> Kelaparan ini disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi beberapa tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan perekonomian di Korea Utara, terutama dalam hal ketersediaan bahan bakar dan barang-barang keperluan industri. Ketidaktersediaan keperluan produksi dan sangat bergantungnya rakyat Korea Utara dengan mesin mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian sehingga berdampak pada kurangnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Selain itu kelaparan diperparah dengan terjadinya bencana alam sehingga lahan pertanian tidak bisa digunakan secara maksimal dan hasil pertanian menurun.<sup>5</sup>

Kelaparan kemudian terulang lagi terjadi pada tahun 1994 yang diperparah dengan bencana banjir sehingga mengakibatkan semakin turunnya persediaan pangan dan sulitnya pemerintah menyediakan kebutuhan pangan untuk rakyatnya.<sup>6</sup> Kemudian pada tahun 1997 terjadi bencana El Nino yang melanda beberapa negara di dunia seperti beberapa negara di Asia dan Timur Tengah, namun Korea Utara mendapatkan dampak yang paling besar, hal ini disebabkan

---

<sup>3</sup> Ibid hal. 12

<sup>4</sup> Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin, *Foreign Assistance to North Korea* (CRS Report for Congress, 2014), hal. i

<sup>5</sup> *Poverty and Famine in North Korea Causes and Consequences*, [www.poverties.org/famine-in-north-korea.html#](http://www.poverties.org/famine-in-north-korea.html#) (terakhir diakses pada tanggal 21 Mei 2015)

<sup>6</sup> Rhoda E. Howard-Hassmann, hal. 7

oleh tidak bisanya negara ini memproduksi kebutuhan pangan karena hanya bisa memproduksi dalam satu musim yakni dari Juni sampai Oktober. Tercatat sekitar 600 ribu hingga satu juta orang meninggal dalam rentang waktu dari tahun 1995 - 2000.<sup>7</sup>

Kelaparan di Korea Utara terjadi secara kontinu dengan penyebab yang hampir sama dari tahun ke tahunnya. Bencana alam yang terus melanda Korea Utara mengakibatkan kegiatan pertanian menjadi terhambat bahkan berdampak pada gagalnya hasil panen yang didapat. Bencana alam seperti banjir dan El Nino juga merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lahan pertanian sehingga petani mengalami kesulitan dalam membangkitkan kembali kegiatan pertanian. Selain itu mempersulit mobilisasi barang kebutuhan untuk pertanian juga transfer hasil pertanian ke daerah lainnya. Permasalahannya lagi-lagi dikarenakan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mencegah atau mengurangi dampak dari terjadinya bencana alam berkepanjangan dan mencari solusi atas permasalahan kelaparan negaranya.<sup>8</sup>

Penderitaan paling jelas dirasakan tentunya pada kaum wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang bisa digunakan oleh negara untuk pertahanan melalui militer, sedangkan kaum pria bisa saja masuk ke dalam militer Korea Utara bekerja untuk pemerintah.<sup>9</sup> Banyak kaum wanita yang rela tidak makan hanya untuk membiarkan anaknya bisa makan dan tidak mati kelaparan, mereka terkadang memberikan makan anaknya dengan rumput liar

---

<sup>7</sup> Meredith Woo-Cumings, *The Political Ecology of Famine: The North Korea Catastrophe and Its Lessons* (ADB Institute Research Paper, 2002), hal. 27-29

<sup>8</sup> Thomas Plumper and Eric Neumayer, *Famine mortality, Rational Political Inactivity, and International Food Aid* (London: LSE Research Online, 2009), (<http://eprints.lse.ac.uk>), hal. 11-12

<sup>9</sup> FIDH, *The Death Penalty in North Korea: In the Machinery of A Totalitarian State*, 2012, hal. 8

karena tidak dapat jatah makanan untuk dimakan. Banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan tidak bisa memberikan nutrisi asi pada balitanya yang berakhir pada kematian, begitu juga dengan anak-anak yang menderita busung lapar dan malnutrisi.<sup>10</sup>

Terbukti pada tahun 1998, Organisasi Internasional *Interntiional Food Agriculture Organization* (FAO), *World Food Programme* (WFP), dan *European Union* (EU) mendapatkan kesimpulan dari data di lapangan bahwa 60 persen anak-anak di Korea Utara memiliki tubuh yang kerdil jauh dari standar normal anak-anak seumuran mereka, 50 persen menderita malnutrisi.<sup>11</sup> Hal ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang kian menurun dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ditambah lagi rakyat Korea Utara hanya bisa makan apa yang bisa mereka dapatkan dengan tidak memperhatikan nutrisinya.

Wanita yang sudah menikah mencari cara mendapatkan uang atau makanan dengan menjual diri mereka ke rumah prostitusi agar anak mereka mendapatkan makanan. Parahnya lagi anak-anak yang tidak punya rumah dan berkeliaran seorang diri di jalanan dianggap sebagai sasaran empuk untuk dijadikan makanan, banyak kemudian rakyat yang membunuh sesama dan memakan daging manusia untuk bisa mengisi perut mereka kemudian melanjutkan hidup. Karenanya kelaparan yang semakin parah mengakibatkan meningkatnya kasus kanibalisme di Korea Utara.<sup>12</sup>

Pemerintah berperan mengatasi kelaparan dengan menerapkan suatu sistem pembagian jatah makanan pada seluruh rakyatnya melalui *Public*

---

<sup>10</sup> Sue Lautzze, *The Famine in North Korea: Humanitarian Response in Communist Nations* (Feinstein International Famine Center: Tufts University, 1997), hal. 10

<sup>11</sup> Rhoda E. Howard-Hassmann, hal. 10

<sup>12</sup> *Ibid* 8-9

*Distribution Sistem* (PDS) seperti yang terlampir pada Tabel 1. Namun, sistem ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan rakyat karena pemerintah memberikan batasan-batasan dan ketentuan dalam menentukan besarnya jatah yang akan diterima rakyat berdasarkan pertimbangan status sosial dan umur. Dari data PDS tersebut bisa dilihat bagaimana pembagian jatah makanan pada masing-masing orang berdasarkan umur dan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya di lapangan PDS tidak bisa menjamin setiap orang mendapatkan jatah makanan yang sesuai sehingga masih banyak pihak-pihak yang rentan terhadap kelaparan seperti wanita dan anak-anak tidak mendapat cukup makanan untuk hidup.<sup>13</sup>

Berikut tabel penentuan jatah makanan oleh pemerintah melalui sistem PDS.

Tabel 1. Jatah Beras dan Jagung Per Kapita Per Hari

Pengelompokan Berdasarkan Pekerjaan dan Umur	Jatah Per Kapita Per Hari (gram)	Jatah Beras dan Jagung	
		Area Pyongyang	Area lainnya
Pegawai pemerintahan tingkat tinggi	700	10:0	10:0
Tenaga kerja tetap	600	6:4	3:7
Tenaga kerja berat	800	6:4	3:7
Pekerja kantoran	600	6:4	3:7
Keamanan khusus	800	7:3	3:7
Militer	700	6:4	3:7
Mahasiswa	600	6:4	3:7
Siswa sekolah menengah	500	6:4	3:7
Siswa sekolah tingkat pertama	400	6:4	3:7
Anak-anak pra-sekolah	300	6:4	3:7
Anak-anak umur di bawah 3 tahun	100-200	6:4	3:7
Orang tua dan penyandang cacat	300	6:4	3:7

<sup>13</sup> *Famine and Life On The Margins: Food Insecurity and Famine*, Contemporary Case Studies, Part 3, [www.hoddereducation.co.uk](http://www.hoddereducation.co.uk), hal. 38

Sumber: Ministry of National Unification<sup>14</sup>

Pasca terjadi kelaparan pada tahun 1990, pemerintah Korea Utara melakukan beberapa reformasi dalam bidang ekonomi dengan mengizinkan pekerja untuk mengolah lahan pertanian yang ada, memperluasnya, dan menjualnya secara illegal di pasar petani. Perusahaan diberikan beberapa hak dari control negara untuk menjual hasil produksi mereka di pasar internasional. Bahkan wanita mulai memasuki dunia kerja dengan menjual makanan atau cendramata, apakah nanti akan digaji atau tidak ataupun dapat gaji yang tidak sesuai. Reformasi ekonomi ini penting untuk memperkenalkan elemen dasar dari sebuah ekonomi pasar yang penting bagi Korea Utara agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.<sup>15</sup>

Namun, pada kenyataannya reformasi ini memiliki konsekwensi yang berakibat buruk pada rakyat Korea Utara, walaupun standar gaji meningkat hal ini juga diikuti oleh meningkatnya harga-harga barang, tapi tidak dibarengi dengan meningkatnya produksi barang substansial, di mana petani dan pabrik masih kekurangan bahan penting dan bahan bakar untuk keperluan produksi. Akibatnya, Korea Utara menghadapi inflasi.<sup>16</sup>

Ditambah lagi usaha pemerintah untuk menerapkan pasar sosialis ini diikuti dengan penghapusan sistem pembagian jatah makanan melalui PDS, sehingga rakyat yang biasanya bergantung pada jatah makanan dari pemerintah dipaksa untuk mencari makanan dan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Penghentian sistem PDS ini kemudian dianggap tidak efektif mengatasi

---

<sup>14</sup> Woon Keun Kim, Hyunok Lee and Daniel A. Summer, *Assessing the Food Situation in North Korea* (University of Chicago: Ministry of National Unification, 1998), hal. 523

<sup>15</sup> Stephan Haggard dan Marcus Noland, *Famine in North Korea: Markets, Aid and Reform* (New York: Columbia University Press, 2007), hal. 203-205

<sup>16</sup> Andrey Lanklov, *Famine In Paradise* (New York: Book Review Roundtable, Columbia University Press, 2007), hal. 219

permasalahan ketersediaan pangan dan kelaparan di Korea Utara sehingga pada tahun 2002 pemerintah kembali menggunakan PDS, melarang kegiatan pembelian dan penjualan secara privat.<sup>17</sup>

Masalah kelaparan di Korea Utara yang diselesaikan oleh pemerintah dengan pembagian jatah makanan pada semua rakyatnya melalui sistem PDS, bergantung pada tiga sumber, yakni ketersediaan pangan hasil produksi dalam negeri, impor barang dan bantuan pangan dari asing. Pemberi bantuan kemanusiaan ke Korea Utara bisa dikelompokkan pada 3 hal, yakni Organisasi di bawah UN, NGO, dan negara secara individu. Bantuan luar negeri yang diberikan melalui UN sekitar 930 juta dolar, NGO 145,55 juta dolar, Korea Selatan 450 juta dolar, Amerika Serikat 550 juta dolar, Jepang 255 juta dolar, Cina 215,6 juta dolar dan Uni Eropa 182,9 juta dolar.<sup>18</sup>

Pemberian bantuan melalui organisasi UN diberikan paling banyak oleh World Food Programme (WFP) yang merupakan organisasi di bawah UN yang bergerak khusus pada pemberian bantuan kemanusiaan berupa bantuan pangan pada negara-negara yang mengalami kelaparan. Dalam menjalankan tugasnya WFP bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti Food Agricultural Organization (FAO) dan International International Fund for Agricultural Development (IFAD) dalam mengatasi isu kelaparan di dunia, ketiga organisasi ini disebut juga Rome Alliances karena sama-sama bermarkas di Roma.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rhoda E. Howard-Hassmann, hal. 11

<sup>18</sup> Mark E. Manyin dan Mary Beth, hal. 13

<sup>19</sup> Directions for Collaboration among The Rome-based Agencies, (Executive Board Second Regular Session, Rome, 2009), WFP/EB.3/2009/11-C, hal. 4

Pada awalnya, Korea Utara menolak inisiatif pemberian bantuan oleh asing karena dianggap melanggar ketentuan kedaulatan negara dan hal ini bertentangan dengan ideologi *juche* negara ini yang memiliki prinsip *self-reliance* di mana Korea Utara secara mandiri mengurus negaranya tanpa bergantung dengan negara lain.<sup>20</sup> Namun dengan usaha yang panjang dari WFP juga dikarenakan keadaan negara Korea Utara yang butuh bantuan emergensi ketika tahun 1990 itu, Korea Utara mau menerima bantuan kemanusiaan. Pemberian bantuan pada masyarakat juga hanya boleh disebarakan melalui sistem distribusi publik. Aturan yang ketat ini mengakibatkan sebagian organisasi menunda pemberian bantuan kemanusiaan namun sebagian lagi menyesuaikan dengan ketentuan aturan dari Korea Utara, demi mendapatkan informasi dan mencapai tujuan mereka.<sup>21</sup>

Pada Tabel 2 bisa dilihat dinamika bantuan pangan yang diberikan oleh WFP pada Korea Utara. Dari tabel ini dapat dilihat bahwasanya WFP secara berkelanjutan memberikan bantuan pada Korea Utara, walaupun mengalami dinamika naik turun. Pada tahun 2006 bisa kita lihat bahwasanya bantuan yang diberikan WFP mengalami penurunan yang disebabkan oleh aksi uji coba nuklir yang dilancarkan Korea Utara yakni pada tahun 2006 dan 2009<sup>22</sup>, sehingga menimbulkan protes dari berbagai negara di dunia. Akibatnya banyak negara dunia yang kemudian mulai mengurangi bahkan meniadakan pemberian bantuan kemanusiaan pada Korea Utara yang disalurkan melalui WFP. Sehingga dampak

---

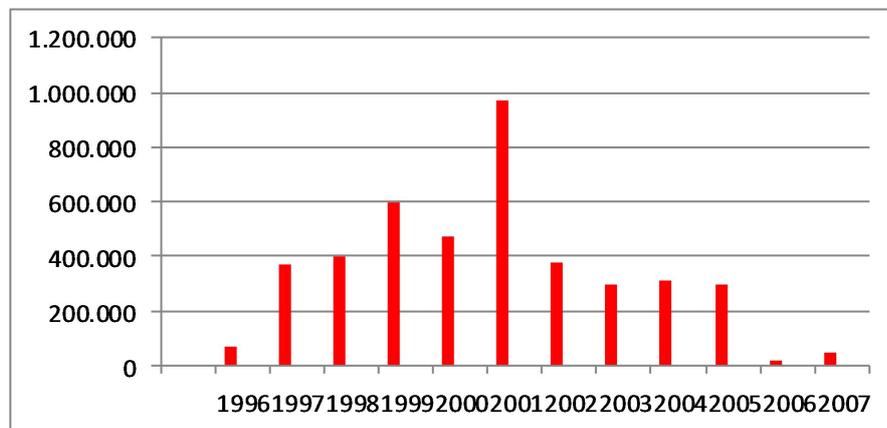
<sup>20</sup> Kongdan Oh dan Ralph C. Hassig, *North Korea Through The Looking Glass* (Washington, D.C: Brooking Institution Press, 2000), hal. 15

<sup>21</sup> Hong Yang-ho, hal. 23-24

<sup>22</sup> Suk Hi Kim, Terence Roehrig dan Benhard Seliger, *The Survival Of North Korea, Essays On Sovereignty, Economy and International Relation*, ed. Suk Hi Kim, Terence Roehrig, Benhard Seliger (North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2011), hal. 15

yang paling besar dirasakan oleh rakyat Korea Utara yang menderita kelaparan dan semakin banyak menimbulkan korban.

Tabel 2. Bantuan Pangan WFP ke Korea Utara Tahun 1996-2007



Sumber: *Interfais Database*<sup>23</sup>

Bantuan pangan yang diberikan WFP bisa dalam bentuk apa saja yang digunakan untuk mencegah terjadinya malnutrisi akut, penyakit dan kematian. Membentuk aktivitas pekerjaan untuk merehabilitasi infrastruktur, mengorganisir sekolah, atau menyediakan dukungan nutrisi bagi bayi yang lahir. Dana bantuan kemanusiaan sering dihabiskan untuk bantuan pangan yang mendesak, dengan tambahan dukungan untuk pencegahan penyakit, kesehatan, atau untuk pengairan dan sanitasi.<sup>24</sup>

Keberadaan WFP sebagai organisasi di bawah UN yang memiliki misi untuk memberantas kelaparan di Korea Utara menjadi menarik ketika berbeda dari negara lainnya yang mengalami kelaparan, Korea Utara memiliki tindakan

<sup>23</sup> Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin, *Assistance to North Korea* ( Congressional Research Service, 2009), hal. 13

<sup>24</sup> Katharina Zellweger, *Aid and Development Cooperation and North Korea: A Window of Opportunities or Pushing at a Close Door?* (Korean Studies, Stanford University, 2012), hal. 3

yang sangat tegas dalam menyeleksi bantuan dan pihak-pihak asing yang masuk ke negaranya. Tindakan pengembangan dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mengakibatkan kesulitan bagi WFP untuk mencapai targetnya memberantas kelaparan di Korea Utara, terbukti selama beroperasi di Korea Utara permasalahan kelaparan dan malnutrisi masih meliputi negara ini. Karena itu, penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana peran dari WFP dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Korea Utara merupakan negara yang rentan terjadi kelaparan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan geografis yang menyebabkan Korea Utara seringkali menghadapi bencana alam. Sistem pemerintahan otoriter yang dianut Korea Utara menjadikan segala kebutuhan dan urusan rakyat diatur oleh negara. Rakyat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya karena hanya bisa bergantung pada jatah makanan yang dikontrol oleh negara. Penanganan kelaparan dan ketahanan pangan sudah berusaha diselesaikan oleh pemerintah Korea Utara namun kelaparan masih berlanjut. WFP merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang khusus menangani permasalahan kelaparan. WFP memiliki mandat untuk mengatasi kelaparan di berbagai negara termasuk Korea Utara. Keberadaan WFP di Korea Utara telah ada semenjak tahun 1995 tapi kelaparan masih berlangsung sampai saat ini. Tindakan uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2006 mengakibatkan menurunnya donor bantuan ke Korea Utara yang berdampak langsung pada kegiatan operasi WFP. Sehingga akan diteliti peran yang dilakukan WFP setelah fenomena tersebut dalam mengatasi permasalahan kelaparan di Korea Utara.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah *Bagaimana peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara pada tahun 2006-2012?*

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat internasional dalam mengatasi persoalan terkait dengan kelaparan dan ketahanan pangan.
2. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil sebuah kebijakan terkait keanggotaannya dalam suatu organisasi dengan menggunakan strategi terkait pembahasan dalam penelitian ini.

### 1.6 Studi Pustaka

Tinjauan pustaka sebagaimana berikut, akan dipaparkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan signifikansi pada topik penelitian yang diambil. Secara umum, peneliti memaparkan tinjauan pustaka berdasarkan penelitian sebelumnya terkait topik yang peneliti bahas.

Pertama, buku karangan Kongdan Oh dan Ralph C. Hassig yang berjudul *North Korea Through The Looking Glass*.<sup>25</sup> Berbicara mengenai issue kelaparan

---

<sup>25</sup> Kongdan Oh dan Ralph C. Hassig, *North Korea Through The Looking Glass* (Washington D.C: Brooking Institution Press, 2000)

dan malnutrisi di Korea Utara tidak terlepas dari pembahasan mengenai apa ideology atau bagaimana berjalannya sebuah pemerintahan hingga lahirnya kebijakan, dalam bukunya ini Kongdan dan Hassig telah membahas secara umum terkait hal tersebut. Korea Utara dikenal sebagai negara yang menganut paham komunis sosialis yang dikenal keras dan memiliki aturan tegas tak terlepas dari unsure-unsur kemiliteran. *Juche* merupakan sebuah prinsip fundamental yang berperan penting dalam mengarahkan ideology Korea Utara. *Juche* bisa diratikan *self-reliance* di mana Korea Utara hanya percaya pada negaranya sendiri, karenanya hampir setiap bidang kehidupan di Korea Utara, apakah itu terkait politik, budaya, social, hubungan luar negeri bahkan kepercayaan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam ideology *juche*.

Begitu juga dengan ekonomi Korea Utara yang melekat pada ajaran-ajaran *juche*, diantaranya: semua alat-alat produksi dimiliki oleh negara dan organisasi kerjasama, semua fasilitas industri dan usaha komersial dimiliki negara, dan kebanyakan lahan pertanian digunakan secara bersama di bawah arahan pihak yang tegas; adanya pemusatan rencana di mana negara merumuskan rencana yang detail untuk menjamin pertumbuhan produksi yang tinggi dan perkembangan ekonomi nasional yang seimbang; prinsip *juche* sebagai *self-sufficiency*, produksi socialist didasari pada pondasi sebuah ekonomi nasional yang mandiri dan tidak bergantung pada negara manapun, karenanya kegiatan perdagangan luar negeri Korea Utara hanya sekitar 10%.

Kemudian ada sebuah kebijakan yang menjadikan Korea Utara mendapatkan perhatian dari seluruh dunia karena sangat memprioritaskan dan

memfokuskan pada kekuatan militer negaranya padahal negara ini termasuk negara yang memiliki permasalahan dengan keuangan, kelaparan dan kemiskinan, yakni *Songun*. *Songun* merupakan suatu kebijakan “military first” Korea Utara yang memprioritaskan tentara Korea Utara dalam urusan negara dan pengalokasian sumberdaya nasional.

Buku ini memperlihatkan pengaruh ideologi *juche* dan *military first policy* Korea Utara memang memiliki pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan bahkan berhubungan dengan negara-negara di arena internasional. Namun, ideologi *juche* yang katanya merupakan perwujudan dari kepercayaan diri dan ketidakinginan Korea Utara untuk bergantung kepada negara lain bisa dibantah, karena selama ini Korea Utara merupakan negara miskin yang selalu bergantung dulunya pada Uni Soviet sebelum collapse dan kemudian bergantung pada Cina.

Terjadinya bencana alam yang menjadi salah satu penyebab kelaparan di negara ini, Korea Utara menerima bantuan dari berbagai negara dan organisasi di dunia, bahkan tak jarang Korea Utara mengajukan proposal permintaan bantuan ke negara atau organisasi internasional. Ketergantungan Korea Utara terhadap bantuan telah menjadikan negara ini memanfaatkan keadaan dan bantuan agar tetap dialirkan ke Korea Utara sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan dalam negeri yang tentunya juga terkait dengan kebijakan mendahulukan kebutuhan militer. Sebenarnya ada dilematik yang dirasakan oleh pendonor karena pemerintah Korea Utara mengintervensi distribusi dan monitor bantuan ke rakyat sehingga pendonor tidak tahu apakah bantuan tepat sasaran sementara isu kelaparan dan kemiskinan semakin parah di Korea Utara.

Kedua, buku Amartya Sen yang berjudul *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Sen dalam buku ini mencoba memaparkan penyebab kelaparan yang terjadi di suatu negara dilihat dari sisi lain tidak hanya terpaku pada FAD (Food Availability Decline) atau kurangnya ketersediaan pangan, Sen juga memaparkan penelitiannya yang dilakukan pada beberapa negara yang dijelaskan dalam buku ini.

*“ Starvation is the characteristic of some people not having enough food to eat. It is not the of there being not enough food to eat.”<sup>26</sup>*

Permasalahan kelaparan bagi Sen disebabkan oleh hal-hal kompleks yang tidak hanya cukup dijelaskan melalui pendekatan biologis dan adanya penurunan ketersediaan pangan dalam suatu wilayah, tapi lebih lanjut dipengaruhi oleh sistem distribusi pangan dan hak kepemilikan (entitlement) yang dimiliki oleh seseorang yang dipengaruhi oleh adanya struktur kelas ekonomi. Sen lebih lanjut menjelaskan adanya keterhubungan antara kelaparan dengan kemiskinan, di mana kelaparan menyiratkan adanya kemiskinan namun tidak sebaliknya. Kelaparan tidak hanya membahas penyebab terjadinya namun juga bagaimana kelaparan bisa berkembang dan berlanjut dari waktu ke waktu walau tanpa adanya penurunan ketersediaan pangan. Bagaimana kelaparan hanya diderita oleh sebagian orang di wilayah tertentu dan bagaimana satu kelompok bisa mendapatkan jatah makanan sedangkan kelompok lainnya tidak, pertanyaan lebih lanjut adalah apakah mengapa mereka tidak punya makanan.

---

<sup>26</sup> Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, (New York: Oxford University Press, 1981), hal. 1

Sen dalam bukunya menawarkan konsep *entitlement approach* dalam menganalisis terjadinya kelaparan dan kemiskinan di mana hal ini merupakan bencana ekonomi bukan karena krisis makanan.<sup>27</sup> Pendekatan hak ini meliputi penggunaan kategori berdasarkan pada tipe-tipe diskriminasi yang ada dalam masyarakat. Sen juga mengatakan bahwa kelaparan dan kemiskinan lebih rentan terjadi pada negara yang tidak menganut sistem demokrasi di mana tidak adanya kebebasan dalam hak kepemilikan di mana semuanya diatur oleh negara.

Sebagaimana yang disampaikan Sen bahwa memang kelaparan akan lebih mudah terjadi di negara yang tidak menjalankan demokrasi terlebih negara dengan sistem otoriter di mana segala hal diatur oleh negara layaknya Korea Utara. Ideologi yang dianut Korea Utara yang menjadikan negara memegang kontrol atas segala kegiatan, hingga masyarakat hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh negara. Kelaparan yang terjadi di Korea Utara tidak hanya disebabkan oleh adanya kekurangan pangan yang dialami oleh negara tersebut tapi lebih jauh adalah adanya permasalahan distribusi pangan yang tidak merata dan diskriminasi berdasarkan kelas dan struktur ekonomi yang ditetapkan oleh negara. Karenanya hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa kelompok militer lebih mudah mendapatkan makanan dibanding masyarakat yang tinggal tidak di kota atau anak-anak dan wanita yang kurang diperhatikan. Sehingga kebanyakan yang menderita dan mati kelaparan adalah anak-anak dan wanita..

---

<sup>27</sup> Ibid hal. 45

Penelitian selanjutnya dari Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin yang berjudul *Foreign Assistance to North Korea*.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas mengenai banyaknya negara dan organisasi internasional yang memberikan bantuan ke Korea Utara, namun dalam hal ini lebih memfokuskan pada pemberian bantuan oleh Amerika Serikat dan motif dibalik pemberian bantuan tersebut. Pada awalnya AS menggunakan strategi yang kaku sehingga hubungan dengan Korea Utara tidak baik namun kemudian AS mengganti pendekatannya ke Korea Utara sehingga bisa melunak dan mencapai kepentingan nasionalnya. AS merupakan salah satu negara pendonor terbesar ke Korea Utara, apakah pemberian bantuan secara bilateral ataupun multilateral melalui beberapa institusi, bantuan tersebut berupa bantuan energi, pangan, tenaga teknis dan pelatihan, medis dan lainnya.

Pemberian bantuan diawali dengan AS merancang berdirinya *Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO), yang terdiri dari beberapa negara yakni Jepang, Korea Selatan, dan UE, organisasi ini memberikan bantuan energi ke Korea Utara dengan membuat reaktor nuklir dan bahan bakar minyak. Kemudian AS juga menggunakan *six party talk* sebagai sarana untuk memberikan bantuan ke Korea Utara. AS menawarkan berbagai bantuan dengan menetapkan berbagai persyaratan diantaranya adalah jika negara ini mengakhiri program nuklirnya dan memenuhi konsen keamanan lainnya, jaminan untuk keamanan secara permanen dan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan energi Korea Utara dan disukusi mengenai normalisais hubungan AS-Korea Utara juga meninggalkan sanksi AS dan menghapusnya dalam daftar negara yang mendukung aksi teroris.

---

<sup>28</sup> Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin , *Foreign Assistance to North Korea* (Congressional Research Service, 2001)

Tujuan dari kebijakan luar negeri AS dalam pemberian bantuan pangan adalah partisipasi Korea Utara dan meningkatkan kerjasamanya dalam beberapa negosiasi yang berhubungan dengan keamanan.. Pada kenyataannya sumber berbagai bantuan yang diberikan ke Korea Utara secara rutin dibagikan untuk dijual kembali di pasar privat atau penggunaan lainnya. Namun, WFP dan lainnya tidak pernah melihat bukti sedikitpun yang menyatakan bahwa militer secara sistematis menggunakan donasi pangan dari UN. Walaupun militer secara tidak langsung menyedot bantuan pangan, beberapa bantuan yang seharusnya dihabiskan pada makanan bisa dihabiskan ke barang lain, seperti militer.

Dan selanjutnya, jurnal penelitian yang berjudul *Political Economy of Saudi Arabia's Overseas Aid Assistance* dari Shivit Bakraina.<sup>29</sup> Dalam jurnal ini Bakraina menggambarkan bagaimana pertimbangan dan kriteria dari Arab Saudi dalam memberikan bantuan ke suatu negara baik secara bilateral maupun multilateral dan menganalisis motif dari pemberian bantuan tersebut. Memanfaatkan pemberian bantuan multilateral melalui institusi regional Arab seperti Arab Fund, Islamic Development Bank, Arab Bank for Economic Development in Africa dan juga UN, yang pada umumnya bantuan berupa infrastruktur, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan.

Sebagaimana setiap negara anggota dalam organisasi memberikan bantuan pada suatu negara berdasarkan kepentingan nasional dan ideologi negaranya, SA menolak anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada negara islam, misalnya saja ketika terjadi bencana Haiti, SA aktif memberikan bantuan kemanusiaan.

---

<sup>29</sup>Shivit Bakraina, *Political Economy of Saudi Arabia's Overseas Aid Assistance* (Governance and Social Development Resource Center: 2012)

Walaupun begitu SA memiliki tujuan pemberian bantuan tersebut yakni: untuk tujuan kemanusiaan dengan tidak memperhatikan siapa negara penerimanya, tujuan terkait agama karena SA merupakan pemimpin islam Sunni dan prinsip yang berkaitan dengan islam, terkait dengan kebijakan luar negeri dan diplomasi di mana hal ini dilakukan untuk membangun aliansi dan digunakan sebagai alat diplomatik, sebagai penjamin keamanan di daerah perbatasan juga keamanan dalam negeri, dan untuk mempromosikan ekspor yang tidak hanya minyak.

Di dalam jurnal ini juga diberikan beberapa contoh pemberian bantuan secara multilateral oleh Saudi Arabia yang pada umumnya diberikan melalui Arab Fund dan UN. Contohnya, pemberian bantuan pada Sudan karena melihat bahwa Sudan sebagai sebuah penyuplai pangan yang penting di masa yang akan datang. Multilateral donor Arab terbesar diberikan ke Sudan, yang menawarkan sebuah program untuk membuat Sudan menjadi *breadbasket* bagi negara Arab, memimpin pembentukan the Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAID).

Selanjutnya, sebuah buku berjudul *Non-Tradisional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*, di dalamnya terdapat sebuah artikel berjudul *Poverty and The Role of NGOs in Protecting Human Security in Indonesia* yang ditulis oleh Bob Hadiwinata. Di dalam artikel ini penulis membahas mengenai adanya pergeseran fokus yang dulunya keamanan tradisional fokus pada negara, sekarang berubah fokus pada keamanan individu atau *human collective*. Kemiskinan yang dialami masyarakat disebabkan oleh kegagalan negara dalam mengatasi kemiskinan yang melanda warga negaranya dengan mengeluarkan kebijakan

publik yang bisa mengatasi hal tersebut. Namun, dalam kasus ini Bob Hadinata menganalisis bahwa keadaan krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak pada kemiskinan warga negaranya menyebabkan negara tidak bisa mengatasi hal tersebut.

*Human security* merupakan konsep yang digunakan untuk meng-cover ketidakamanan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Maksud *human security* di sini terdiri dari: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas dan keamanan politik. Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam keamanan manusia ini dikarenakan: pertama fakta bahwa keamanan negara dan individu merupakan hal yang saling terkait, kedua semua hal terkait warga negara di-cover dan dijamin oleh negara sebagai pembuat kebijakan, ketiga *human security* termasuk pada ranah publik yang membutuhkan aksi negara untuk menjamin setiap warga negara aman.<sup>30</sup>

### 1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme dalam melihat permasalahan kemanusiaan dan kelaparan di Korea Utara dan menganalisis keterlibatan WFP dalam mengatasi hal tersebut. Liberalisme merupakan pandangan dalam hubungan internasional yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), di mana mereka percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Bob Hadiwinata, *Poverty and The Role of NGOs In Protecting Human Security in Indonesia*, Vol. 9 of *Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*, ed. Mely Caballero-Anthony, Relf Emmers, Amitav Acharya, (England: Ashgate Publish Limited, 2006), 201

<sup>31</sup> Dunne, Tim, *The Globalization of World Politics* (Oxford University Express, 2001)

Kelaparan merupakan suatu kondisi di mana masyarakat tidak punya cukup makanan dan asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh tidak cukup tersedianya pangan di suatu daerah tapi lebih jauh penyebab kelaparan terkait dengan analisis kebebasan substantif dengan melihat pada faktor *entitlement* dari individu dan keluarga.<sup>32</sup> Menurut Sen, pertama bahwa tidak ada hubungan antara kelaparan dan rendahnya faktor produksi yang menyebabkan rendahnya ketersediaan pangan atau yang disebut *Food Availability Decline* (FAD). Kelaparan dalam hal ini merupakan keadaan di mana makanan tersedia, namun masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapatkannya karena makanan tidak didistribusi secara merata dan lemahnya daya beli dikarenakan masyarakat miskin, tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan yang cukup untuk hidup.<sup>33</sup>

Kedua, kelaparan memiliki sedikit kemungkinan terjadi di negara dengan sistem pemerintahan demokrasi.<sup>34</sup> Kelaparan lebih mungkin terjadi di negara yang menganut sistem otoriter seperti Korea Utara, karena segala hal diatur oleh negara atau pemerintah, sedangkan rakyatnya harus mematuhi peraturan tersebut. Negara demokrasi, memiliki prinsip-prinsip yang mengakui kebebasan dan HAM, sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya sendiri.

Organisasi Internasional dianggap juga sebagai aktor dalam hubungan internasional disamping adanya negara, baik yang bersifat *International Governmental Organization* (IGOs), *Multi National Cooperation* (MNCs)

---

<sup>32</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 1999) hal. 160-162

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Amartya Sen, *Poverty and Famine*

ataupun *Non-Governmental Organization* (NGOs). Liberal melihat bahwa penyelesaian masalah kelaparan dan krisis pangan dalam Korea Utara memerlukan keterlibatan dari organisasi internasional dengan melakukan berbagai program bantuan dan mendorong terjadinya kerjasama ke negara tersebut.<sup>35</sup> Pemberian bantuan melalui institusi multilateral merupakan perwujudan dari solidaritas negara terhadap negara lain.<sup>36</sup> Di mana kelaparan termasuk ke dalam isu yang terkait dengan kemanusiaan yang menjadi fokus utama bagi kaum liberal dan tentunya organisasi internasional yang harus segera diatasi.

#### 1.7.1 Organisasi Internasional

Sistem internasional yang bersifat anarki dengan permasalahan internal negara yang kompleks menjadikan negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyatnya memungkinkan aktor lain di luar negara seperti organisasi internasional untuk terlibat dalam penanganan permasalahan suatu negara. Organisasi internasional menurut Clive Archer didefinisikan sebagai sebuah badan formal dengan struktur berkelanjutan yang didirikan berdasarkan kesepakatan antara anggota, apakah itu negara atau non-negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dari anggotanya.<sup>37</sup>

Organisasi internasional terbagi atas 2 jenis yakni *International Governmental Organization* (IGO) yang keanggotannya terdiri dari pemerintah

---

<sup>35</sup> David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to international Political Economy* (New jersey: Prentice Hall Inc, 1996) hal. 389-399

<sup>36</sup> Lumsdaine D. Halloran, *Moral vision in International Politic* (New Jersey: Princeton University Press, 1993), hal. 33

<sup>37</sup> J. Meierhenrich, *International Organization*, (UK: University of London, 2012), hal. 11-12

pada masing-masing negara dan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang keanggotannya bukanlah dari pemerintah sebagai badan legal formal.

Lebih lanjut Clive Archer memaparkan peran dari organisasi internasional<sup>38</sup>, yaitu:

a. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menelaraskan tindakan.

b. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun, berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain-lain).

c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Lebih spesifiknya Situmorang mengelompokkan peran IGO sebagai inisiator, mediator, rekonsiliator, fasilitator dan determinator.<sup>39</sup>

- a. Peran inisiator merujuk pada peran yang dilakukan organisasi internasional untuk mengajukan isu atau permasalahan ke tingkat forum internasional sehingga nantinya didapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>38</sup> ibid

<sup>39</sup> Mangadar Situmorang, *Organisasi Internasional* dalam Andre Pariera, ed. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 135

- b. Peran sebagai fasilitator dilakukan oleh organisasi internasional dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- c. Peran sebagai determinator mengacu pada peran organisasi internasional mengajukan dan menetapkan suatu keputusan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada.
- d. Peran sebagai mediator dilakukan ketika organisasi internasional ditunjuk menjadi pihak ketiga dalam sebuah negosiasi yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- e. Peran sebagai rekonsiliator adalah ketika organisasi internasional ikut serta dalam sebuah organ yang dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau sebagai pihak yang sudah ditunjuk sebelumnya dalam melakukan resolusi konflik.

Negara sebagai aktor yang punya kedaulatan bukan tanpa alasan ikut masuk dalam sebuah organisasi internasional. Kenneth Abbott dan Duncan Snidal berpendapat bahwa keberadaan organisasi internasional membolehkan pemusatan kegiatan bersama melalui sebuah struktur organisasi yang konkrit dan stabil dan sebuah aparat yang mendukung. Hal ini akan meningkatkan kegiatan bersama dan kemampuan organisasi untuk mempengaruhi pemahaman, lingkungan dan kepentingan negara. Namun, keberadaan IGO yang memiliki aturan, norma, perjanjian dan kebijakan yang mengikat dan mempengaruhi negara, IGO tetap memiliki power yang terbatas pada negara sebagai pihak yang memiliki kedaulatan. Keterbatasan ini berupa kemampuan untuk memaksakan sebuah

keputusan, tapi IO bisa memberikan rekomendasi dalam pembuatan keputusan sebuah negara.

Penjelasan terkait konsep organisasi internasional di atas dapatlah dilihat bahwa WFP merupakan organisasi pemerintahan (Intergovernmental Organization). Konsep organisasi internasional ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis keberadaan WFP dalam permasalahan kelaparan di Korea Utara dan menjelaskan bagaimana mekanisme perannya sebagai organisasi internasional untuk melakukan penanganan masalah kelaparan. Penelitian ini berupaya menjelaskan peran yang dilakukan oleh WFP dalam 3 peran yakni, peran sebagai inisiator, determinator dan fasilitator. Peran sebagai mediator dan rekonsiliator dinilai tidak cocok digunakan dalam menjelaskan peran WFP dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara. Hal ini dikarenakan keberadaan WFP di Korea Utara bukan ditunjuk sebagai mediator atau rekonsilator yang akan terlibat dalam resolusi konflik.

### 1.7.2 *Food Security*

Definisi dan konsep *food security* terus mengalami perkembangan setiap tahun dari konsep dasarnya yaitu keamanan, jumlah yang cukup dan makanan yang sesuai untuk setiap orang. Konsep ketahanan pangan yang paling sering digunakan adalah yang mengacu pada definisi yang ditetapkan oleh World Bank dan Maxwell dan Frankerberger yaitu: “akses yang dimiliki semua orang pada setiap waktu untuk memperoleh pangan yang cukup untuk hidup sehat”.

Berdasarkan handbook mengenai bantuan pangan yang dikeluarkan oleh WFP, Food security ditentukan oleh 3 elemen<sup>40</sup>, yaitu:

*a. Food availability*

Ketersediaan pangan yang dimaksudkan adalah jumlah pangan yang secara fisik tersedia di dalam sebuah negara atau area dalam semua bentuk, apakah itu berasal dari produksi domestik, barang impor komersil atau berupa bantuan pangan. Pangan mungkin saja tersedia di negara namun tidak di beberapa area sehingga menyebabkan terjadinya krisis pangan. Hal ini disebabkan oleh jika paksaan logistic dan keamanan mencegah pergerakan *supply* makanan dari suatu area ke bagian lain dalam suatu negara, jika penjual tidak punya insentif untuk menjual *supply* barang yang ada ke suatu area karena rendahnya daya beli di area tersebut dan jika pihak tertentu mencegah makanan sampai ke kelompok populasi.

*b. Food access*

Maksudnya adalah kemampuan rumah tangga untuk secara tetap mendapatkan cukup makanan melalui kombinasi dari simpanan dan produksi dari lahan pertanian mereka, atau mencari sumber makanan dari alam. Mendapatkan makanan dari kemampuan sosialisasi mereka berupa pinjaman, barter dengan pihak lain atau mendapatkan hadiah. Selain itu bisa didapatkan melalui program bantuan pangan apakah itu bantuan berupa makanan secara langsung, cash ataupun ikut program *food for work*.

*c. Food utilization*

---

<sup>40</sup> *Emergency Food Security Assessment Handbook (World Food Programme: Emergency Need Assessment Branch, 2005)*, hal. 31-32

*Food utilization* merupakan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi anggota keluarganya agar kesehatan terjaga dan terhindar dari penyakit. Hal ini bergantung pada, pertama fasilitas yang dimiliki oleh keluarga untuk memiliki cadangan makanan simpanan dan untuk diolah. Kedua pengetahuan mereka untuk menyiapkan makanan, memberi makanan anak-anak dan individu lain seperti orang sakit dan orang-orang tua. Ketiga, bagaimana makanan dibagikan di dalam rumah tangga merujuk pada kebutuhan masing-masing anggota keluarga, dan terakhir kesehatan masing-masing individu.

Dari penjelasan konsep ketahanan pangan (*food security*) di atas, maka fenomena kelaparan yang terjadi di Korea Utara akan dianalisis melalui kerangka konseptual ketahanan pangan. Hal ini dilihat dari 3 elemen terkait ketahanan pangan yakni dari segi ketersediaan pangan, akses dan pemanfaatan makanan tersebut dalam masyarakat Korea Utara. Kemudian akan dilihat bagaimana dampak berlarutnya permasalahan kelaparan di Korea Utara yang memerlukan peran dan keterlibatan organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan ini. Konsep *food security* digunakan untuk menganalisis peran WFP sebagai determinator di mana penting bagi WFP terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana kondisi ketahanan pangan di Korea Utara.

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan materi deskriptif yang didapat melalui prosedur dan data-data berupa kata-kata baik tertulis atau lisan. Metode ini juga mengamati perilaku dari objek yang akan diteliti, yakni institusi internasional dan negara sebagai

pembuat kebijakan dalam hubungan internasional. Sehingga dari proses yang dapat diamati nantinya bisa dipahami bagaimana sesuatu itu muncul.<sup>41</sup>

Penelitian kualitatif terjadi dalam natural setting di mana perilaku objek dan isu yang terjadi bisa diamati. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian dimulai dari pengumpulan data secara holistik, membangun persepsi yang make sense dengan kehidupan, memahami objek kajian, sampai menghasilkan suatu kesimpulan yang bisa diterima dan digunakan. Penelitian ini tidak hanya melihat dari satu sisi saja, karena menyadari bahwa objek penelitian merupakan suatu kejadian yang dinamis dan meliputi kenyataan multiple.

Dalam penelitian kualitatif hasil disesuaikan dan didapatkan melalui pemaknaan dan interpretasi dari peneliti sendiri berdasarkan data-data sumber yang telah didapat. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hasil penelitiannya harus disesuaikan dengan uji validitas dari objek yang diteliti, sedangkan hasil penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi kebenaran dari data sehingga hasil bisa dipercaya.<sup>42</sup>

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tepat sasaran dan tidak melebar penulis memberikan batasan penelitian pada peran yang dilakukan oleh WFP ke Korea Utara pada tahun 2006 yang ditandai dengan penurunan bantuan yang diberikan oleh WFP disebabkan oleh kegiatan uji coba nuklir pertama oleh Korea Utara, sampai pada tahun 2012 yang menandai berakhirnya program bantuan khusus selama 2 tahun periodenya, juga selama rentang kurun waktu tersebut bisa dilihat dinamika naik

---

<sup>41</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Thousand Oaks: Sage Publications. 2009), hal. 293

<sup>42</sup> Ibid hal. 226-228

turun bantuan yang diberikan WFP dan perkembangan dari hasil peran yang telah dilakukan.

### 1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data* yaitu data terpercaya yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Peneliti terlebih dahulu mencari tahu keyword data apa yang akan digunakan dalam penelitian Hubungan Internasional. Peneliti juga meminjam buku pada teman terkait metodologi dan beberapa buku terkait penelitian ini.

Keterbatasan buku yang ada dan dibutuhkan mendorong peneliti untuk mencari alternative dengan mengunjungi situs-situs penyedia *e-book* seperti libgen.org, bookfi.org dan dari google books (<http://books.google.com>). Buku yang didapat terkait dengan konsep yang nantinya digunakan untuk kerangka konseptual dan penjelasan lebih lanjut di Bab IV nanti. Peneliti juga mencari data pada situs institusi terkait topik yang dibahas seperti: situs WFP ([www.wfp.org](http://www.wfp.org)), [www.poverties.org/index.html](http://www.poverties.org/index.html), [www.northkoreanow.org](http://www.northkoreanow.org), dan [www.hrw.org/](http://www.hrw.org/). Dari situs ini peneliti mendapatkan informasi terkait dengan isu kelaparan di Korea Utara dan kebijakan pemberian bantuan pangan oleh WFP.

Kemudian peneliti juga menggunakan data dari jurnal ilmiah, paper, essay ilmiah juga dari lembaga penelitian. Jurnal yang didapat digunakan untuk keperluan memahami isu kelaparan di Korea Utara dan konseptual. Peneliti juga mencari jurnal dan tulisan terkait topik yang dibahas melalui *search engine* google dengan menuliskan keyword pencarian sebagaimana yang telah disebut di

atas. Selain itu untuk mendapatkan informasi mengenai update issue kelaparan di Korea Utara dan bantuan WFP peneliti aktif mencari informasi di situs berita online.

Sebelum pada akhirnya menganalisis data yang telah terkumpul, penulis melakukan literature review untuk memahami politik dan keadaan domestik Korea Utara terlebih dahulu. Lalu peneliti melakukan review terkait WFP dan perannya dalam memberikan bantuan pangan ke Korea Utara, barulah selanjutnya peneliti mereview terkait konseptual yang akan digunakan.

### 1.8.3. Tingkat Analisis

Dalam penelitian Hubungan Internasional, menganalisis sebuah fenomena yang diteliti haruslah dengan sasaran penelitian yang tepat. Peneliti harus mampu menunjukkan ketelitiannya dalam melakukan analisis, termasuk dalam menentukan tingkat analisis dalam penelitiannya. Dalam memilih tingkat analisis, kita menetapkan unit analisis, yaitu yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan (karena itu juga bisa disebut variabel dependen), dan unit eksplanasi, yaitu yang dampaknya terhadap unit analisis yang hendak kita amati (bisa juga disebut variabel independen). Unit analisis dalam penelitian ini merupakan World Food Programme (WFP) dengan unit eksplanasi adalah negara Korea Utara. Level analisis penelitian ini berada pada level negara.

### 1.8.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Tipe analisis data dalam pendekatan studi kasus ini dapat berupa analisis holistik yaitu analisis keseluruhan kasus atau analisis mendalam dari aspek spesifik dalam kasus tersebut. Melalui pengumpulan data yang telah dilakukan,

kemudian peneliti mendeskripsikan secara detail terhadap kasus yang muncul. Seperti sejarah kasus, kronologi kegiatan, atau meneliti perkembangan dari kasus tersebut.<sup>43</sup>

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian peneliti akan meneliti secara detail mengenai peran WFP dalam mengatasi issue kelaparan di Korea Utara. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap kasus yang akan diteliti. Dokumen-dokumen tentang sejarah terjadinya kelaparan yang melanda Korea Utara sehingga mendapatkan respon dari dunia internasional dan organisasi internasional yang kemudian akan dideskripsikan berdasarkan pemahaman peneliti.

Setelah melakukan deskripsi ini, kemudian peneliti dapat fokus pada beberapa isu kunci dalam kasus yang ada (*analysis of themes*) dan memahami kompleksitas dalam kasus tersebut.<sup>44</sup> Melalui data-data yang didapat, akan dilakukan analisis untuk mendapatkan pemahaman detail mengenai kasus yang menjadi pembahasan peneliti. Dalam tahapan interpretasi akhir, peneliti memaparkan makna dari kasus yang diteliti Analisis data yang dilakukan peneliti ini berlangsung sejak dimulainya pengumpulan data, baik selama pencarian data berlangsung maupun paska pengumpulan data.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

BAB ini merupakan Bab Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan

---

<sup>43</sup> John W. Creswell, hal. 75

<sup>44</sup> Ibid

penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

## BAB II KRISIS PANGAN DALAM KELAPARAN DI KOREA UTARA

BAB ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang *food insecurity* yang terjadi di Korea Utara, kemudian memaparkan penyebab terjadinya dan menjelaskan apa saja dampak yang timbul dari hal tersebut

## BAB III UN – WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)

BAB ini akan mendeskripsikan bagaimana *World Food Programme* sebagai sebuah organisasi internasional dan kemudian menjelaskan hal-hal terkait mekanisme seperti pendanaan, kegiatan operasional, keanggotaan yang terdapat dalam WFP.

## BAB IV PERAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM MENGATASI KELAPARAN DI KOREA UTARA TAHUN 2006-2012

BAB ini akan mendeskripsikan program-program yang dijalankan oleh WFP di Korea Utara dalam konteks mengatasi kelaparan, kemudian akan dipaparkan halangan atau rintangan yang dihadapi dalam menjalankan peran WFP melaksanakan programnya tersebut. Pembahasan ini nantinya akan disertai dengan analisis menggunakan kerangka konseptual yang ada.

## BAB V KESIMPULAN

BAB ini akan disimpulkan berbagai temuan dari analisis yang telah dilakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan menyuguhkan hasil terpenting dari penelitian, kesimpulan dan kontribusi yang didapat dari penelitian ini.